



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2024



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan II Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 Juli 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2024.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
8. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 106,34. Selama Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 13 indikator

kinerja, dimana 12 indikator lainnya belum dilaksanakan perhitungan dan baru akan dihitung ketika semester 2 ataupun tahunan sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 9 indikator kinerja:

1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 50 dan capaian sebesar 50;
2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 87,7;
3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 118,1;
4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
5. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
6. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
7. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 60 dan capaian sebesar 80;
8. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 80 dan capaian 89,85;
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 77 dan capaian 85,02;
10. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100%;
11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
12. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 94% dan capaian sebesar 133,33%.
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan (Nilai)target 82 dan capaian sebesar 96,65.

Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 39,57% atau sebesar Rp **15.141.195.243,-** (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp **38.259.850.000,-** (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Maksud dan Tujuan.....	11
C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	11
D. Data Umum Organisasi	12
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	16
BAB II.....	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024.....	17
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024.....	19
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
E. Pengukuran Capaian Kinerja	23
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024 24	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024	24
2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan.....	24
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	27
1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	27
2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	40
3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.....	56
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	68
5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	72
C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Dengan Satker UPT Sejenis / Setara.....	64

D. Efisiensi.....	67
E. Realisasi Anggaran.....	81
BAB IV.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran dan Rekomendasi.....	87

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan <i>Speedboat</i> siap operasi	15
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja	16
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	21
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024	25
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas.....	28
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 8. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	29
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024	30
Tabel 10. Capaian IKU 2.....	32
Tabel 11. Perhitungan Capaian IKU 2.....	33
Tabel 12. Capaian IKU 3.....	36
Tabel 13. Perhitungan capaian IKU 3	36
Tabel 14. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	38
Tabel 15 Capaian IK 4.....	39
Tabel 16. Tahapan pemeriksaan IKU 7.....	41
Tabel 17. Capaian IKU 7	41
Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 19. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II	44
Tabel 20. Rekap Pengawasan Pencemaran.....	45
Tabel 21. Rekap Pengawasan PRL	47
Tabel 22. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi	49
Tabel 23. Rekap Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan.....	51
Tabel 24. Rekap Pengawasan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.....	53
Tabel 25. Pemeriksaan IKU 8.....	56
Tabel 26. Capaian IKU 8.....	57
Tabel 27. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 28 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan Triwulan II.....	59
Tabel 29. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW II Tahun 2024	60
Tabel 30. Rekap Pengawasan Unit Pengolahan Ikan	62
Tabel 31. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran	64
Tabel 32. Rekap pengawasan budidaya	65
Tabel 33. Capaian IKU 9.....	69
Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024	69
Tabel 35. Rekap penganan sanksi administratif.....	70
Tabel 36. Capaian IK 12.....	74
Tabel 37. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024	75
Tabel 38. Capaian IK 15.....	76

Tabel 39. Capaian IK 16.....	77
Tabel 40. Capaian IK 18.....	78
Tabel 41. Capaian IK 21.....	79
Tabel 42. Capaian IK 24.....	80
Tabel 43. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024.....	87

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	14
Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	15
Gambar 3 Sistematisa Penyusunan LKJ Stasiun PSDKP Belawan	16
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.
- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

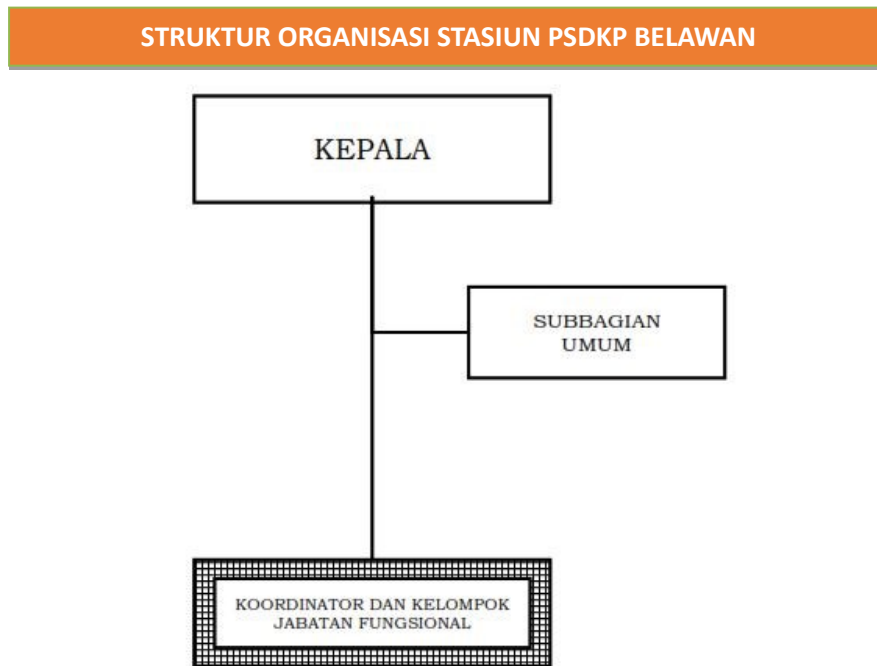
c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-

masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas dan *speedboat* pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan
5	Dolphin 014	8 Meter	Satwas Asahan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 151 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 86 orang, 5 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 51 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah (Orang)
1	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	27	4	13	44
2	Satuan Pengawasan SDKP Langsa	3	1	1	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Idi	3	-	1	4
	- Wilker Pengawasan SDKP Lhokseumawe	1	1	-	2
	- Wilker Pengawasan SDKP Biureun	1	-	-	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Sigli*	-	-	-	-
3	Satwas Pengawasan SDKP Asahan	5	3	4	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Batubara*	-	-	1	1
4	Satuan Pengawasan Rokan Hilir	3	-	2	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Panipahan	-	-	1	1
	-Wilker Pengawasan SDKP Dumai	1	-	1	2
	-Wilker Pengawasan SDKP Kep. Meranti	2	-	-	2
	-Wilker Pengawasan SDKP Indragiri Hilir	2	-	-	2
5	KP. Hiu 01	11	-	1	12
5	KP. Hiu 08	11	-	1	12
7	KP. Hiu 16	10	-	2	12
	Total	80	9	29	117

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan LKJ Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2024; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :
"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 - 2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dan Perikanan yang tuntas	10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82		

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 106,34% untuk Triwulan II, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan
Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 25 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2024	JUNI	JUNI	
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						0	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	50	50	100
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,78	
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	87,7	96,37
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	118,06	120
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						0	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100	
7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100	
8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120	
9	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	60	80	120
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						0	
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	0		0
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						110,02	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	89,85	112,31
13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	0		0
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0		0
15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100

16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	77	85,02	110,42
17	Penilaian Mandiri SAKIP SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0		0
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21	0		0
20	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	133,33	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0		0
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	82	96,65	117,87
25	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	0		0

Pada Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 25 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 13 IK dilaksanakan dengan kriteria 6 IK dengan predikat baik, 7 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan II tahun 2024. Realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 39,57% atau sebesar Rp 15.141.195.243,- (Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dari alokasi anggaran Rp 38.259.850.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	19.684.016.000	6.373.288.733	32,38%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000	193.135.468	22,75%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512.707.000	188.969.979	36,86%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.072.000.000	280.384.191	26,16%
5	Dukungan Manajemen	16.142.127.000	8.105.416.872	50,21%
Total		38.259.850.000	15.141.195.243	39,57%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 13 indikator kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas"**. Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 80% dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Indikator ini menjadi target semesteran yaitu 50 dan tahunan yaitu 80.

Pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pada TW II Tahun 2024 capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas tercapai sesuai target yaitu sebesar 50. Target ini tercapai karena Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki rencana kerja kegiatan pengawasan (bobot 20%) dan telah melakukan pendataan keaktifan Pokmakwas (bobot 30%). Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, saat ini Stasiun PSDKP Belawan masih menunggu jadwal dari anggota komisi IV DPR RI.,

Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas pada TW II tahun 2024 sama dengan Capaian IKU pada TW II tahun 2023. Capaian IKU ke-1 "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas", dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan II 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU1	2024 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	50	50	100
IKU1	2023 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	50	50	100

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2024 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	-	-	-	-	80	80

Sampai dengan 30 Juni 2024 belum ada realisasi anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 0%.

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi dengan Seditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas. Pelaksanaan tugas pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan

yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran Kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Perbandingan capaian IKU pada SK 2 ini pada TW II Tahun 2024 di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

No	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2023	Capaian TW II Tahun 2023	Target TW II Tahun 2024	Capaian TW II Tahun 2024
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87.6	99,25	91	87,7
2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87.6	94,52	91	118,06
3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	-	-	100	100

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2021 : Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	-	-	0,78	1,8	-	-	-
2021 : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	0,028	0,11	-	-	-
2022 - 2024 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	91	-	-	-	87,5	87,6	91
2022 - 2024 : Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas	91	-	-	-	87,5	87,6	91
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	-	-	-	-	-	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.570.846.000 dan sampai dengan 30 Juni 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 5.549.433.381 atau sebesar 47,96%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar 47,96%.

Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu 01, Kapal Pengawas Hiu 08 dan Kapal Pengawas Hiu 16, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 571.

a. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Stasiun PSDKP Belawan mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terutama di WPP NRI 571. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal

pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%, Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 unit kapal ikan per hari dan 1 objek kelautan per periode operasi.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Selama Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian **87,7** dengan persentasi **96,37%** sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 dari target Triwulan II sebesar **91**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 10. Capaian IKU 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	91	91	87,7	87,7	99,25

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan belum mencapai target. Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 ini juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023. **Analisa penyebab tidak** tercapainya target TW II pada IKU 2 ini karena :

1. Adanya target pemeriksaan kelautan pada TW II yang belum terlaksanakan oleh Kapal Pengawas.

Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Perhitungan Capaian IKU 2

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II	TW II			TW II			TW II								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi		
1	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	60	67	78,17	2	0	0,00	31,27	0,07	0,06	33,98	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	40	5	85,25	87,70
		KP. HIU 08	60	56	65,33	2	0	0,00	26,13	0,07	0,07	37,88	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	0	40	5	84,01				
		KP. HIU 16	75	76	70,93	4	0	0,00	28,37	0,28	0,32	45,48	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	93,85		

Selama Triwulan II, KP Hiu 01 telah melaksanakan 10 hari operasi, KP Hiu 08 telah melaksanakan 10 hari operasi dan KP Hiu 16 telah melaksanakan 18 hari operasi. Realisasi anggaran untuk operasional kapal pengawas sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.492.080.381 atau sekitar 48,11% dari total pagu sebesar Rp.11.182.856.000.

b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Dalam kurun waktu sampai akhir Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian yang diperoleh sebesar **118,06** dengan persentase sebesar **120%** dari **target sebesar 91 pada Triwulan II 2024**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 12. Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2024	TW II	s/d	TW II
			2024	TW II	2023
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	91	91	118,06	118,06	94,52

Selama Triwulan II tahun 2024 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 91, bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023 capaian pada Triwulan II Tahun 2024 mengalami peningkatan. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 13. Perhitungan capaian IKU 3

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW II			TW II				TW II			TW II			TW II				TW II			TW II			TW II					
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi			
Stasiun PSDKP Belawan	Dolphin 14	15	22	73,3	2	0	0,0	29,33	0,00011	0,00010	37,7	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	87,06	118,058
	Napoleon 28	5	16	160,0	2	0	0,0	64,00	0,00005	0,00008	65,1	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	149,06	

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patroil lebih optimal;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang serta peralatan keselamatan, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Mengidentifikasi armada yang sudah tidak dapat beroperasi, armada yang sudah tidak layak guna segera dilaksanakan pelaporan sehingga tidak lagi memperoleh anggaran operasi yang nantinya bisa menghambat pencapaian kinerja;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp. 57.353.000,- atau sebesar 14,78% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 387.990.000. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Stasiun PSDKP Belawan selama Triwulan II telah melaksanakan 9 hari operasi dari total keseluruhan 2 armada speedboat pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan kepada 20 KII.

1 Armada Stasiun PSDKP Belawan (Napoleon 028) berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 1 Armada berada dalam kondisi siap terbatas yaitu Doplhin 014 yang berada di satwas Asahan. Realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	TMT Operasi	Realisasi Hari Operasi	Kapal Diperiksa			Kapal Ditangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Keterangan
				KII	KIA	JML	KII	KI A	JML		
1	Napoleon 028	30	3	7	-	7	4	-	4	571	Siap Operasi
2	DOLPHIN 014	30	6	13	-	13	-	-	-	571	Siap Terbatas

c. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang aspek pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas meliputi logistik kapal dan logistik personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personal meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas atau berita acara sisa pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan atk dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

FORMULA:

$$X_p = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

- X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2024. Capaian ini diperoleh dengan ketentuan bahwa Stasiun PSDKP Belawan telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personal.

Berdasarkan manual indikator kinerja maka indeks kinerja ini dianggap terpenuhi dengan berita acara tersebut. Untuk komponen logistik lainnya seperti pemenuhan natura, atk/cs, air bersih maka Stasiun PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun SPJ pembelian, dan untuk ketersediaan senjata dan amunisi didasarkan pada laporan ketersediaan senjata maupun amunisi oleh kapal pengawas. Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan. Berikut tabel capaian indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.

Tabel 15 Capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2024	TW II	s/d	TW II
			2024	TW II	2023
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	-

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistic personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Stasiun PSDKP Belawan melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistic atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggungjawaban;
- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Stasiun PSDKP Belawan melalui tim kerja Prasarana dan sarana operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP atukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;

- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama Triwulan II tahun anggaran 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp. 4.574.798.456,- atau 47,95% dari total anggaran operasional sebesar Rp. 9.539.817.000,-.

3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah pernah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan sebelumnya.

a. IKU 7: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Tahapan pemeriksaan IKU 7

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2024 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target triwulan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2024	TW II	s/d	TW II
			2024	TW II	2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan

batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan,

sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;

2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut :

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	16 pelaku usaha.	95	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	-	-	-	100	-
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-	-	-	-	100

Berikut kami sajikan rekapitulasi data pengawasan SDK selama Triwulan II tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 19. Rekap pemeriksaan SDK Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW II Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2023
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	4	0
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	14	0
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	8	2
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	25	0
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		53	2

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif. Realisasi anggaran selama Triwulan II tahun 2024 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 188.969.979,- atau 36,86% dari pagu sebesar Rp. 512.707.000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 8 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam

pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pada tahun 2024 target pencemaran yang harus dicapai sebanyak 30 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Perlu untuk diketahui bahwa pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan belum banyak terdapat pabrik atau industri skala besar yang berpotensi melakukan pencemaran.

Tabel 20. Rekap Pengawasan Pencemaran

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Marindo Utana Lestari	- Unit pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
CV. Prima Vaname Sejahtera	- Unit pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
PT. Halindo Berjaya Mandiri	- Agar PT. Halindo Berjaya Mandiri rutin melakukan uji sampel air limbah dan melaporkannya keinstansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai atau OPD yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.
PT. Mutiara Laut Abadi	- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Mutiara Laut Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
PT. Winson Prima Sejahtera	- Berdasarkan hasil pengawasan, dokumen rencana pencegahan pencemaran telah sesuai dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran
PT. Suri Tani Pemuka	- Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
PT. Global Pasific Seafood Industry	- Berdasarkan hasil pengawasan PT. Global Pasific Seafood Industry sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
PT. Suri Tani Pemuka	- Tidak ditemukan indikasi pelanggaran

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 14 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Terdapat 2 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 21. Rekap Pengawasan PRL

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	Muhammad Hamdani dan Muhammad Fahrul Riza	2 s.d 4 April 2024	Feri Irawan Sitorus	PT. Pertamina Patra Niaga FT Krueang Raya	Submarine Pipeline	di Desa Meunash Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	NIB 8120200840621, PKKPR, Izin Lingkungan	^		PT Pertamina segera melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi
2	Stasiun PSDKP Belawan	Muhammad Iqbal, Rio Sakti	23-Apr-24	Salim	PT ADHITYA SERAYAKORITA,	terminal khusus (TERSUS).	Kota Dumai Provinsi Riau.	NIB 8120315111055, PKKPR, Izin Lingkungan, Izin Operasional Tersus	^		Pelaku usaha agar tetap melaksanakan enam belas kewajiban yang tercantum dalam dokumen PKKPR dengan baik dan jangan terlewat perihal laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
3	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Rina Puspa Sari, Muhammad Fathir	24-Apr-24	Lensa Sembiring	PT. PLN UP3 Binjai	Interkoneksi kabel laut 20KV Pulau Sumatera - Pulau Sembilan	Kelurahan Desa Pulau Sembilan, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	NIB, persetujuan KKPRL, Izin lingkungan, dan izin pembangunan dengan titik koordinat	^		menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri sebelum tanggal 16 Desember 2024
4	Stasiun PSDKP Belawan	Muhammad Iqbal, Irfan Dani Syahputra	29-Apr-24	Teguh Sofiyanto	PT. Semen Padang	Terminal Khusus	di jalan Cut Nyak Dien, Kel. Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau	NIB 8120202951843, PKKPR, Izin Lingkungan, Izin Operasional Tersus, dan IPAL	^		menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri sebelum tanggal 21 Desember 2024
5	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Muhammad Fahrul Riza, Asmaul Husna, Muhammad Fathir	6-Mei-2024	Nurul Awal	PT. Pertamina Patra Niaga AFT Kuala Namu	Submarine Pipeline	Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	NIB 9120309310613, PKKPR, Izin Lingkungan	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 27 Desember 2024.
6	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Muhammad Fahrul Riza, Asmaul Husna, Muhammad Fathir	7 s.d 8 Mei 2024	Itto Wirawan	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group, Medan-Belawan	Submarine Pipeline	Medan – Belawan.	NIB 9120309310613, PKKPR, Izin Lingkungan,	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 03 Desember 2024..
7	Stasiun PSDKP Belawan	Muhammad Iqbal, Rio Sakti, Mahendra, Irfan Dani Syahputra	08 Mei 2024	Tandi S	PT. Marita Makmur Jaya	Terminal Khusus	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 9120007111706, Izin Operasional Tersus, PKKPR, Izin Lingkungan Hidup	^		Selanjutnya akan dilakukan Pemanggilan pada pihak PT.MMJ guna permintaan keterangan, untuk melengkapi data dan memperoleh keterangan tertulis lebih jelas.
8	Stasiun PSDKP Belawan	Zahra Rasyid, Muhammad Fahrul Riza, Abdullah Ali Hakim Nasution, Retno Adiarti	14 Mei 2024	Sutrisno	PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu	Terminal Khusus	Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara	NIB, persetujuan KKPRL, Izin lingkungan dari KemenLHK, DLKR-DLKPP, Surat Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 27 Desember 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah dalm perizinan PKKPR
9	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Muhammad Fahrul Riza, Nur Baety Alifiani	15 Mei 2024	Moh Salim A.Pi	PPS Belawan	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Belawan	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Prov. Sumatera Utara	KKRL, Izin Lingkungan	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah KKRL..
10	Stasiun PSDKP Belawan	Dia Murthala, Muhammad Hamdani, Muhammad Fahrul Riza	18 Mei 2024	Eri Wahab	BUT. Zaratex. NV	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Prov. Aceh	NIB 0209210000029, PKKPR, Izin Lingkungan	^		Tetap menyampaikan Laporan Tahunan secara rutin pertahunnya Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 karena BUT Zaratex N.V Lhokseumawe telah menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 Februari 2024.
11	Stasiun PSDKP Belawan	Irmansyah Putra, Hartoto, Bernardo Nababan	14 Mei 2024	Roganda Silaban	PT. Multimas Nabati Asahan	TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)	Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara.	NIB 9120503102224., PKKPR, Izin Lingkungan	^		Diperlukan pemantauan dan/atau pencarian informasi secara berkala terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut ini; dan Rekomendasi kepada PT. Multimas Nabati Asahan agar dalam operasionalnya selalu mematuhi ketentuan (hak dan kewajiban) yang tercantum dalam dokumen PKKPR, khususnya memberikan akses pada nelayan kecil dan menyampaikan laporan tertulis setiap tahun.
12	Stasiun PSDKP Belawan	Susanto Manggopa, Muhammad Fahrul Riza, Rio Sakti, Mahendra	11 Juni 2024	Riswandi S. Tinambunan	PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP)	Kegiatan Dermaga dan Reklamasi	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau	NIB 8120013181654, PKKPR	^		Polsus PWP3K dan tim akan melakukan pemanggilan permintaan keterangan terhadap PT.RAPP segera terkait indikasi pelanggaran berupa 2 Jetty dan 1 Kegiatan Reklamasi yang kemudian akan dilakukan ekspose terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
13	Stasiun PSDKP Belawan	Susanto Manggopa, Muhammad Fahrul Riza, Rio Sakti, Mahendra	11 Juni 2024	-	PT. Samudera Siak	Pelayanan Logistic	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau	NIB 8120001940553,	Perlu Di Klarifikasi		Akan memintai keterangan ke KSOP Kelas II Tanjung Buton terkait kepemilikan Lokasi Dermaga/Pelabuhan yang disewa oleh PT. Samudera Siak.
14	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja, Muhammad Iqbal, Irfan Dani Syahputra,	12 - 14 Juni 2024.	Bonar Ari Nindito	PT. Imbang Tata Alam	Penambangan Minyak Bumi, Penggunaan Dermaga	Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.	NIB 1276000371105, PKKPR, SK PKPLH	^		Mendorong adanya komunikasi antara Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Kepala Divisi Formalitas, SKK Migas yang dilanjutkan dengan membuat Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP/Direktur PSDK kepada Kepala SKK Migas, yang isinya permohonan agar SKK Migas memerintahkan seluruh K3S yang ada di Indonesia, yang kegiatannya memanfaatkan ruang laut, untuk mengajukan PKKPR pada Tahun 2024 ini.

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 2 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Stasiun PSDKP Belawan belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan Stasiun PSDKP Belawan terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 22. Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Fitri Zuliana, Rina Puspasari	25-Apr-24	Indra Syaifu	PT. ALAM BIRU INDONESIA	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Jl. Ladang, Gang Perjuangan No.42 B, Kel Kedai Durian Kec. Medan Johor, Kota Medan	NIB 1217000462639, SIPJI DALAM NEGERI, SIPJI LUAR NEGERI, SIUP	^		Dari hasil pengawasan terhadap PT. Alam Biru Indonusa disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
2	Stasiun PSDKP Belawan	Dia Murthala, Muhammad Hamdani, Muhammad Fahrul Riza, SM Khalidi	27 Juni 2024	Ferry Angriawan	-	Jenis ikan yang diperdagangkan adalah Sirip Hiu	Gampong Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa	NIB 01112200908670001 SIPJI Dalam Negeri, SAJI DN	^		Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Fery Angriawan disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan

Pada TW II Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan kepada 4 pelaku usaha. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 1 target pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan.

Tabel 23. Rekap Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	Denggan M. Ilmi, Irmansyah Putra, Chaidi Rindiawati, Muhammad Fathir	26-Apr-24	Rizal	PT. Anugerah Nelayan Andalan	Pengelolaan Objek Wisata	Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara	NIB 1508230055919, Pengelolaan Objek Wisata,	^		Pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya
2	Stasiun PSDKP Belawan	Dia Murtahala, Muhammad Fahrul Riza, Samsul Bahri, Azhari	28 Mei 2024	Efendi	R.M Pondok DangDangna	Pengelolaan Objek Wisata	Desa Lancok Pantai Lancok Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara,	NIB 1705240088152, SPPL,	^		Perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap usaha wisata bahari untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Disarankan juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemuda, OlahRaga, dan Pariwisata setempat untuk pengembangan kegiatan wisata bahari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Muhammad Fathir	12 Juni 2024	Fendy Halim	PT. Musim Mas	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	JL. K.L.Yos Sudarso KM. 7,8, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	NIB 8120304772353, PPKPLH, Izin Lingkungan	^		Agar tetap Mengurus Izin PPKPRL dan Izin Air Laut Selain Energi (ALSE)
4	Stasiun PSDKP Belawan	Sirman Rajagukguk, Muhammad Fathir	12 Juni 2024	Fendy Halim	PT. Intibenua Perkasatama	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Spring Tower 02-21 JL. K.L. Yos Sudarso, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	NIB 8120108803912, PPKPRL, Izin Lingkungan	^		Tindak Lanjut untuk melakukan pengawasan Air Laut Selain Energi untuk kegiatan pendingin kondensor dan air umpan Boiler di Kota Dumai

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak merupakan kegiatan yang baru ada pada RKAKL tahun 2024 di Stasiun PSDKP Belawan. Pada TW II tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak kepada 25 pelaku usaha. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan 15 target pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan Destructive Fishing meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 24. Rekap Pengawasan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
1	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Bustalami	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
2	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Mistar	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
3	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Aidi	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
4	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Nurdin	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
5	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Agung Saputra	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
6	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Hasni	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
7	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Arbain	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
8	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Saini	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
9	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Imran	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
10	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Harahap	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
11	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Junaidi	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
12	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Rahmat	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
13	Stasiun PSDKP Belawan	Hendri hamzah, Sila Sazali, Hardiansyah, Wahyuri Purnamasari	29 s.d 30 April 2024	Abd Gofar	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
14	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Amin Rahul	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
15	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Abdullah Samad	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
16	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Benni	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.

No	UPT/Satwas	Pelaksana	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
									Ya	Tidak	
17	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Syafe'i	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
18	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Azizul Fahmi	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
19	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Hasroni	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
20	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Aluwi	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
21	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Baizar	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
22	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Kamarudin	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
23	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Kamarudin S	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
24	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Salamuddin	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
25	Stasiun PSDKP Belawan	Sila Sazali, Sri Kartaharja	14 s.d 15 Mei 2024	Mukhtar	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.

4. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 8: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
- X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 25. Pemeriksaan IKU 8

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 6.

Tabel 26. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;

3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak *stakeholder* yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 27 berikut :

Tabel 27. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	-	-	-	-	100	100

Sepanjang Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 69 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 26,16% atau sebesar Rp. 280.384.191,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.072.000.000,-. Berikut kami sajikan tabel rekapitulasi total pengawasan sumber daya perikanan.

Tabel 28 Rekapitulasi pengawasan sumber daya perikanan Triwulan II

NO	PENANGKAPAN	BUDIDAYA	PENGOLAHAN	PEMASARAN	Total
1	30	19	8	12	69
	30	19	8	12	69

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pada TW II Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan Pengawasan terhadap 30 pelaku usaha kapal perikanan dan Stasiun PSDKP Belawan juga telah melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Capaian pada TW II tahun 2024 ini lebih besar bila dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan capaian 17 pelaku usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2024 sebagaimana Tabel 30 dibawah ini.

Tabel 29. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW II Tahun 2024

Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Rekomendasi (BAP)
SIE TJENG TJHAI	202112-2810-2412-4351-536	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SIE BENG KHUN	202201-1915-2748-5509-466	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
ANTON CHANDRA	202311-2510-4756-5833-735	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
ANTON CHANDRA	202310-2110-0804-3457-055	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
ANTON CHANDRA	202308-1215-2438-1734-757	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONDI HARYONO- cek KBLI	202202-0209-1320-4163-318	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONDI HARYONO	202202-1513-0004-0374-280	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SENG HUAT	202202-2209-0102-0695-140	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONG TEK SAMAN	202312-0908-1916-4069-987	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONG TEK SAMAN	202312-0908-2022-8856-251	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONG TEK SAMAN	202312-1011-0118-6134-554	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
TONG TEK SAMAN	202312-1011-0001-3042-134	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SUBANDI	202309-1821-2329-6412-221	Pembinaan dan Perbaikan
SANDIMAN	202312-1211-2048-1453-047	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SANDIMAN	202308-1216-2021-9539-952	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SIE BENG KHUN	202401-3013-5441-8623-378	Pembinaan dan Perbaikan
SUBANDI	202309-1820-5743-9419-763	Pembinaan dan Perbaikan
AMAN SAHLAN	202310-1107-5524-7416-483	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

AMAN SAHLAN	202310-1107-5041-6072-174	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
hasni	202308-2912-3900-4675-983	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
hasni	202307-3115-2534-1423-013	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SITI ZAHARAH	202310-1107-3407-3704-834	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SITI ZAHARAH	202310-1107-2652-9922-822	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
AGUS MULYONO	202312-0909-1913-3821-843	Pembinaan dan Perbaikan
WILLYAM WIJAYA	202312-0715-1255-4954-644	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SURIANI	202302-0320-3247-6392-248	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SAIDUL BAKHRI	202308-2515-0303-9073-639	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SAIDUL BAKHRI	202308-2915-4550-6744-323	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SAIDUL BAKHRI	202308-2514-5821-7359-718	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
SENG HUAT	202202-2209-0102-0695-140	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan

kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB).

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 kepada 8 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Capaian pada TW II tahun 2024 ini lebih sedikit bila di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan capaian 15 pelaku usaha. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 30. Rekap Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0108-4016-7912-262	OSS	Nilai tingkat kepatuhan untuk KBLI 10293 yaitu 100 % (baik sekali)
PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	201912-2322-2137-0901-661	OSS	Nilai Kepatuhan teknis KBLI 10213 yaitu 100 % (Baik Sekali)
PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0516-2816-8808-392	OSS	Nilai kepatuhan teknis KBLI 10219 yaitu 100 % (Baik Sekali)
PT FUDA SARI LAUT	201912-3019-5511-8644-612	OSS	PT. Fuda Sari Laut belum memenuhi dokumen persyaratan perizinan berusaha dikarenakan SKP telah mati pada tanggal 31 Januari 2024 dan akan dilakukan pemanggilan kepada PT. Fuda Sari Laut untuk dilakukan pengambilan berita acara keterangan terkait matinya masa berlaku SKP salah satu produknya.
PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	201912-3017-1810-7377-415	OSS	PT SSP melakukan pengolahan di bidang pembekuan ikan. Bahan baku berasal dari Deli Serdang, Belawan, Aceh, Serdang Bedagai. Volume produksi PT. SSP sebesar 6.600 Ton/Tahun Nilai kepatuhan teknis KBLI 10213 sebesar 100%

			dengan kategori Baik Sekali.
PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202212-0214-0316-3883-564	OSS	PT. SSP bergerak di bidang pembekuan biota air lainnya. Bahan baku berupa Chepalopod, Crab, Ikan berasal dari Gabion, Kota Medan, dan Deli Serdang. Volume Produksi 2000 ton/tahun. Tujuan ekspor Eropa, China. Hasil penilaian kepatuhan teknis KBLI 10293 sebesar 100% (Baik Sekali)
PT FUDA SARI LAUT	201912-3019-5511-8705-870	OSS	SKP Pada Produk Udang Mentah Beku (Frozen Raw Shrimp) telah habis masa berlakunya sejak tanggal 3 Januari 2024
PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	202206-2615-3041-2545-072	OSS	Perusahaan belum memiliki perizinan berusaha (SKP, PMMT/HACCP) dan Izin Lingkungan akan tetapi telah melakukan kegiatan usaha/operasional.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor unit pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor unit pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 kepada 12 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian pada TW II tahun 2024 ini lebih besar bila di dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023

dengan capaian 11 pelaku usaha. Berikut tabel capaian Pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan Triwulan II Tahun 2024

Tabel 31. Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

Nama Perusahaan/Perorangan	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya)	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
CV BAHAGIA	IMPOR	Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran
CV CTK	IMPOR	Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
CV KARYA LAUT	IMPOR	Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 46206 sebesar 98,75 % dengan kategori baik sekali. Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
CV SAMUDERA MARINE FISH	IMPOR	CV. Samudera Marine Fish pada tahun 2023 mendapatkan kuota impor sebesar 1,500.000 Kilogram melakukan Kegiatan Impor CV. Samudera Marine Fish hingga 29 November 2023 telah terealisasi sebanyak 1.498.317 Kilogram. Kuota impor yang tersisa untuk periode 2023 sebanyak 1.683 Kilogram. Ikan impor didistribusikan kepada industri pemindangan yang berada di wilayah Sumatera Utara – Sibolga. Dari hasil skoring, nilai kepatuhan CV. Samudera Marine Fish (KBLI 46206 – Perdagangan Besar Hasil Perikanan mendapatkan skor 84.75% dengan kategori BAIK SEKALI.
CV SELAT MALAKA FROZEN	IMPOR	berdasarkan hasil Monitoring, Ikan Salem dan Kuring sudah habis terealisasi, sedangkan Ikan Aso aso tersisa 5.600kg
CV SUMBER LAUT ABADI	IMPOR	Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 46206 sebesar 98,75 % dengan kategori baik sekali. Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
IKI PT KARUNIA SAMUDERA HINDIA	IMPOR	Pengawasan Distribusi Ikan impor dilakukan pada Instalasi Karantina Ikan PT Kasahi di Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang, pendistribusian hanya dilakukan ke UPI PT Kasahi yang berlokasi di Kecamatan Sarudik Kabupaten Deli Serdang. Pendistribusian menggunakan Truk berpendingin. Dari hasil pemeriksaan dan analisa, ikan impor dari IKI PT Kasahi ke UPI PT Kasahi tidak digunakan untuk tujuan lain. Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha menunjukkan hasil yang Baik Sekali dengan nilai kepatuhan sebesar 84,75%.
PT ASSA BELAWAN	IMPOR	Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha KBLI 46206 sebesar 87,4 %
PT GOLDEN CUP SEAFOOD	IMPOR	Tidak Ditemukan Indikasi Pelanggaran
PT PUTRI INDAH	IMPOR	Tidak Ditemukan Indikasi Pelanggaran
PT PUTRI MANALU BERSAUDARA	IMPOR	Seluruh kegiatan distribusi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dengan melengkapi dokumen PI, PIB, SKP, sertifikat Kesehatan Ikan dari Negara Asal
PT SUNARKHO MEKAR JAYA ABADI	IMPOR	untuk Realisasi Ikan Salem sebanyak 418.317 kg, dan sisa 81.516 kg, sedangkan ikan Kuring terealisasi sebanyak 249.490 kg, dan sisa 510kg

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (traceability) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 kepada 19 pelaku usaha. Capaian pada TW II tahun 2024 ini lebih sedikit bila di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan capaian 21 pelaku usaha. Berikut tabel capaian Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 32. Rekap pengawasan budidaya

Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan (BAP)
PT SURYAWINDU PERTIWI	202203-2622-0120-0506-861	OSS	Penilaian Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha KBLI 03212 sebesar 55.00 dan Penilaian administrasi 38.18 Sehingga Total Nilai Kepatuhan 93,18 (Baik Sekali)

JEREMIA TARIGAN	-	KPB	berdasarkan nilai kepatuhan teknis pelaku usaha KBLI 03224, dengan bobot penilaian 71,1% dengan nilai kepatuhan usaha Baik Sekali. catatan dalam perbaikan penilaian kepatuhan KBLI 03224 belum adanya pelaporan kegiatan usaha dan belum melakukan monitoring tindaklanjut yang terdokumentasi.
FIRDAUS	202207-0410-2455-1111-963	KPB	Usaha budidaya ini telah memiliki perizinan berusaha tetapi salah KBLI seharusnya 03221 bukan 03229. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur untuk memenuhi sistem manajemen usaha. Usaha budidaya ini menggunakan pakan HI Provite 781, 781-1 yang telah terdaftar di KKP. Usaha ini tidak menggunakan obat/vitamin apapun .Benih berasal dari BBI Bangkinang yang sudah bersertifikasi CPIB.
OGI ASEUDO	202212-0511-5320-4235-843	KPB	Usaha budidaya ini telah memiliki perizinan berusaha tetapi salah KBLI seharusnya 03221 bukan 03229. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur untuk memenuhi sistem manajemen usaha. Usaha budidaya ini menggunakan pakan HI Provite 781, 781-1 yang telah terdaftar di KKP. Obat yang digunakan yaitu EM\$ Perikanan yang telah terdaftar di KKP.Benih berasal dari BBI Bangkinang yang sudah bersertifikasi CPIB.
Taslem	-	Insidental	
SUKARDI	202404-2912-2838-4164-869	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Harapan Kana	202403-0111-5313-0274-710	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Mukhlis	20240-3021-2394-2394-1272-4089	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur

Edy Surifto	202404-2912-0735-0553-861	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Binaranga Tarigan	-	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Marim Tarigan	-	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Zainuddin	202309-1911-3729-4741-936	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
Suharyani	-	KPB	Telah menerapkan prinsip - prinsip cara budidaya ikan yang baik. Pakan dan obat yang digunakan telah terdaftar di KKP. Benih berasal dari unit yang sudah memiliki CPIB. Diperlukan pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur sebagai pemenuhan sistem manajemen usaha
SAPRI FARM	-	Insidental	Skor Kepatuhan teknis 89%(Baik Sekali), Pelaku usaha telah melakukan budidaya dengan baik
CINBENG FARM	-	Insidental	Skor Teknis 93% (Baik Sekali) Pelaku usaha telah melakukan budidaya dengan baik
MARTIN FARM	-	Insidental	Skor Teknis 93% (Baik Sekali) Pelaku usaha telah melakukan budidaya dengan baik
AHAT STEFANUS FARM	-	Insidental	
YANTO SAPUTRA FARM	-	Insidental	Skor Teknis 77% (Baik Sekali) sudah menerapkan sebagian besar budidaya yang baik
AHAT STEFANUS FARM	-	Insidental	

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

5. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

a. IKU 9: Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. penerapan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Penerapan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 80 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 22 dari 22 kasus pengenaan administrasi yang terdiri dari 8 Kasus SPKP dan 14 Kasus Pelanggaran Perizinan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 33. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	60	80	80	80	100

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Adinistratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	0	0	93	-	-
Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	-	-	-	80	-
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-	-	-	-	80

Tabel 35. Rekap pengenalan sanksi administratif

No.	Nama Kapal (GT)	Jenis Kapal	Alat Tangkap	Pelaku Usaha/ Perorangan			Pemeriksa		Pelanggaran	Proses Penanganan		
				Nama	Peran	Nahkoda	Unit Kerja yang Menangani	Kapal		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
1	MITRA SEJATI - 58	PENANGKAP	Pancing Ulur	HU JU		Edi Saputra	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	SIPI habis masa berlaku, tanpa dilengkapi SLO dan SPB, melanggar DPI diatas 12 mil	SP1	B.810/PSDKPSta.2.2/PW.110/II/2024	21 Maret 2024
2	SELAMAT JADI XXXII	PENANGKAP	Pancing Cumi	WILSON ALLEN YOUNG		Riswanto	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1021/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
3	SELAMAT JADI XXXI	PENANGKAP	Pancing Cumi	YUKI AGUSTWO		Hamdani	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1019/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
4	MAHKOTA -38	PENANGKAP	Pancing Ulur	CALVIN		Mhd Iman	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.839/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024	25 Maret 2024
5	SUMBER LAUT	PENANGKAP	Purse Seine	SUHENDRA		Usman Ginting	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.842/PSDKPSta.2/PW.110/III/2024	25 Maret 2024
6	BINTANG TERANG XVIII	PENANGKAP	Pancing Ulur	RITA SUSANTI		Agus Syahputra	STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 01	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1020/PSDKPSta.2.2/PW.110/IV/2024	25 April 2024
7	CAMAR - 25	PENANGKAP	Bouke Ami	Sarwo Pranoto			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1127/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
8	PELITA - 1	PENANGKAP	Bouke Ami	Susanto			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1128/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
9	SUMBER BINTANG REZEKI 88	PENANGKAP	Purse Seine	ILYAS SANGKOT			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.0001/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	13 Mei 2024
10	PRIMA JAYA	PENANGKAP	Purse Seine	LISNAWATY			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. HIU 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1409/PSDKPSta.2/PI.120/V/2024	13/Mei/24
11	SUMBER MUTIARA INDAH	PENANGKAP	PSPK	PO TJAI			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1134/PSDKPSta.2/PW.110/V.2024	07 Mei 2024
12	HARTATI 3	PENANGKAP	Purse Seine	ARSAN JEFRI			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 12	Melanggar DPI diatas 12 mill	SP1	B.1133/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	07 Mei 2024
13	MEKAR BARU 58	PENANGKAP	Purse Seine	HENDY			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	Kapal beroperasi diatas 12 mil laut tanpa dilengkapi SIPI, SPB dan SLO yang berlaku, dan melakukan bongkar muat di laut	SP1	B.1228/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	17 Mei 2024
14	TANJUNG - I	PENANGKAP	Gill Net	HERMAN			STASIUN PSDKP BELAWAN	KP. Hiu 08	Kapal beroperasi diatas 12 mil laut tanpa dilengkapi SIPI, SPB dan SLO yang berlaku, dan melakukan bongkar muat di laut	SP1	B.1227/PSDKPSta.2/PW.110/V/2024	17 Mei 2024

Perhitungan Capaian Sanksi Administrasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)							ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU	
		TRANSSH IPMENT	PELABU HAN PANGK ALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLA H	DALA M PROSE S	SUDA H	PROSES BAP / SURAT PEMANG GILAN	BUKAN PELANGG ARAN	SP1	SP2	DEND A		PIDA NA
						<30 hari	>30 hari	Total										
1	BELA WAN	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	4	-	4	-	-	-	100%
	TOT AL	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	4	-	4	-	-	-	100%

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama Triwulan II tahun 2024 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 149.955.468,- atau sekita 47,91% dari total pagu Rp.313,000,000,-.

6. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
2. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
6. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
8. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Selama kurun waktu Triwulan II Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 6 indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 1,4,5,7,10 dan 13.

a. IK 12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

Formula:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 89,85 dari target 80. Apabila dibandingkan dengan TW II tahun 2023 terdapat penurunan capaian sebesar 0,84 karena capaian Pada TW II tahun 2023 IKU ke-12 ini sebesar 90,69. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 36. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2024	TW II	s/d	TW II
			2024	TW II	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	80	89,85	89,85	90,69

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	-	0	80	80	80	80

b. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada Triwulan II tahun 2024**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian pada TW II Tahun 2024 ini sama dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 38. Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II	2024	TW II	s/d	TW II
			2024	TW II	2023
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar eveluasi kegiatan sebelumnya.

c. IK 16: Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin,

profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, (2)Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), (3) Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan (4) Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2024 adalah 82 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Capaian IK ini pada TW II Tahun 2024 tercapai sebesar 85,02 dari target 77. Capaian IK ini pada TW II Tahun 2024 ini mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 78,69. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 39. Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2023	TW II 2023
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indkes)	77	82	85,02	85,02	78,69

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Monitoring dari pimpinan terkait dengan pencapaian indeks profesionalitas setiap pegawai di Stasiun PSDKP Belawan dilakukan secara berkala;
2. Setiap pegawai aktif mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan seminar, baik yang di adakan secara online atau pun offline;
3. Beberapa pegawai telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar .

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan

gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

d. IK 18: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Pada TW II Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memiliki 16 rekomendasi untuk ditindak lanjuti dan ke 16 rekomendasi tersebut telah di tindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Belawan dan telah tuntas. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Dengan di tindaklanjutnya rekomendasi tersebut, maka pada IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan TW II Tahun 2024 tercapai 100% dari target 80%. Capaian IK ini pada TW II Tahun 2024 ini sama bila di dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 40. Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2024	TW II 2023
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Monitoring dari pimpinan terkait dengan rekomendasi hasil Pengawasan yang dokumennya perlu ditindaklanjuti dan di lengkapi;
2. Peran aktif dari seluruh Ketua Tim Kerja dan pegawai Stasiun PSDKP Belawan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil Pengawasan sehingga bisa tindak lanjutnya bisa di lengkapi tepat waktu;

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan

gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

e. IK 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;
- o Keaktifan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffice dengan target 94% pada Triwulan II Tahun 2024. Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 133,33%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II Tahun 2024 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada Triwulan II ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffice dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Capaian IK ini pada TW II Tahun 2024 ini mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 41. Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II	TW II 2023
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94%	94%	133,33%	133,33%	100%

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;

- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffee;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Stasiun PSDKP Belawan dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

f. IK 24: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (Delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian. **Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 96,65 dari target 82 pada TW II ini.** Capaian IK ini pada TW II Tahun 2024 ini mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan capaian pada TW II Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 92,64. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 42. Capaian IK 24

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
	TW II 2024	2024	TW II 2024	s/d TW II 2024	TW II 2023
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	82	94	96,65	96,65	92,64

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah dan akan terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar bagian keuangan dapat melakukan Analisa terkait kebutuhan anggaran atas kegiatan tersebut;

- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau setiap kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada TW II tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibandingkan sebanyak 13 IKU dengan capaian 12 Kinerja tercapai 100% dan 1 IKU belum tercapai sesuai target. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja TW II tahun 2024 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

1. IKU-1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	50	50	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	50	-	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	50	50	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	50	-	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	50	50	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	50	50	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	50	50	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	50	50	100%

2. IKU-2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	100,77	110,74%
2	Stasiun PSDKP Biak	91	104,82	115,19%
3	Stasiun PSDKP Ambon	91	100	109,89%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	91	91,01	100,01%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	89,34	98,18%
6	Stasiun PSDKP Belawan	91	87,70	96,37%
7	Stasiun PSDKP Kupang	91	97,62	107,27%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	91	92,56	101,71%

3. IKU-3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	95,14	104,55%
2	Stasiun PSDKP Biak	91	138,72	152,44%
3	Stasiun PSDKP Ambon	91	94,46	103,80%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	91	113,42	124,64%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	83,22	91,45%
6	Stasiun PSDKP Belawan	91	118,06	129,74%
7	Stasiun PSDKP Kupang	91	96,11	105,62%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	91	129,52	142,33%

4. IKU-4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

5. IKU-7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

6. IKU-8 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

7. IKU-9 Indeks peneakan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	60	80	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	60	80	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	60	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	60	60	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	60	80	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	60	80	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	60	60	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	60	100	120%

8. IKU-12 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	87,86	109,83%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	86,62	108,28%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	92,63	115,79%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	90,5	113,13%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,56	115,70%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	89,5	111,88%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	96,6	120,75%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	91,85	114,81%

9. IKU-15 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

10. IKU-16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	77	81,83	106,27%
2	Stasiun PSDKP Biak	77	87,97	114,25%
3	Stasiun PSDKP Ambon	77	79,27	102,95%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77	82,85	107,60%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77	81,23	105,49%
6	Stasiun PSDKP Belawan	77	85,02	110,42%
7	Stasiun PSDKP Kupang	77	87,27	113,34%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	77	87,77	113,99%

11. IKU 18 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	80	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	80	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	80	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%

12. IKU-21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	94	133,33	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	94	133,33	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	94	120	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	94	133,33	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	94	131,67	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	94	133,33	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	94	133,33	120%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	94	133,33	120%

13. IKU-24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	82	97,07	118,38%
2	Stasiun PSDKP Biak	82	95,16	116,05%
3	Stasiun PSDKP Ambon	82	83,15	101,40%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	82	94,7	115,49%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	82	94,5	115,24%
6	Stasiun PSDKP Belawan	82	96,65	117,87%
7	Stasiun PSDKP Kupang	82	99,28	121,07%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	82	96,03	117,11%

D. Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada Stakeholder, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan II Tahun 2024. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran

keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II 2024 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Belawan.

2. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

E. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2024 tanggal 24 November 2023, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 36.669.969.000,-. Pada TW II, Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan penambahan anggaran untuk pembangunan renovasi Stasiun PSDKP Belawan, sehingga anggaran Stasiun PSDKP Belawan bertambah menjadi Rp. 38.259.850.000,-. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar Rp. 15.141.195.243 atau 39,57% berdasarkan data OMSPAN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan II Tahun 2024, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun Triwulan II tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 106,34. Selama kurun waktu Triwulan II UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 13 Indikator Kinerja. 7 IK biru (istimewa) 6 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan III Tahun 2024. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2024 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 43. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap capaian Indeks Operasional Kapal Pengawas	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Rencana Operasi Kapal Pengawas.• Melaksanakan Docking Kapal Pengawas HIU 01 dan HIU 08 secepatnya, agar pelaksanaan operasi kapal pengawas bisa terlaksanak optimal	<ul style="list-style-type: none">• Triwulan III